KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ngarep Masyarakat Maklumi Pembangunan Gedung Baru DPR Ditertawakan, Ha,Ha,Ha
Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Ngarep Masyarakat Maklumi Pembangunan Gedung Baru

DPR Ditertawakan, Ha, ha, ha,

Masyarakat telah banyak melontarkan kritik pedas atas wacana pembangunan gedung baru DPR. Pemerintah juga telah menyatakan tidak akan merestui. Tapi, tetap saja DPR ngotot ingin melakukan pembangunan. DPR malah meminta masyarakat bisa memaklumi pembangunan itu.

PERMINTAAN agar masyarakat bisa memaklumi itu disampaikan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anthon Sihombing. Dia beralasan, pembangunan gedung baru DPR sudah mendesak. Pembangunan itu perlu dilakukan untuk menunjang kinerja Dewan, karena gedung yang ada saat ini sudah tidak ideal.

Politisi Golkar ini lalu menyalahkan para pengamat, yang dianggapnya telah membangun opini buruk terhadap DPR tanpa melihat kondisi gedung yang sebenarnya terjadi. "Kalau hanya mengkritik tanpa melihat fakta, kan tidak bagus juga. Membentuk opini tidak bagus bagi rakyat itulah tujuan mereka (para pengamat). Tetapi saya yakin masyarakat dapat menilai mana yang baik dan benar. Masyarakat bisa melihat mana fakta mana opini," ucapnya, kemarin.

Anton seperti sudah yakin betul rencana pembangunan itu bakal gol dan dimaklumi masyarakat. Pihaknya bahkan sudah melakukan hitung-hitungan biaya untuk pembangunan gedung baru. Kata dia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 601 miliar. Biaya itu untuk dua proyek. Rinciannya, Rp 320,44 miliar untuk pembangunan gedung baru dan Rp 280 miliar untuk pembangunan alun-alun demokrasi. Dia mengklaim, penghitungan anggaran itu sudah melalui kalkulasi yang matang dan tidak serampangan.

Untuk pembangunannya, kata Anton, tidak serta merta dilaksanakan dalam kurun waktu setahun. Rencannya, pembangunan itu akan dilakukan dengan sistem tahun jamak alias multiyears. Pembangunan juga akan memperhatikan kondisi keuangan negara.

Anton tidak terima jika disebut pembangunan itu untuk kemewahan anggota DPR periode ini. Sebab, proyek gedung baru tersebut tidak akan selesai saat DPR periode ini selesai pada 2019. Kata dia, pembangunan itu untuk kepentingan anggota DPR periode selanjutnya. Agar anggota DPR baru nanti dapat bekerja lebih maksimal.

"Walaupun anggota DPR adalah lembaga politik, wajar sebagai BURT untuk memikirkan kepentingan seluruh anggota Dewan. Karena anggota itu maunya nyaman kerja di ruangan, menerima tamu di ruang kerjanya," sambungnya.

Anton kemudian menjelaskan alasan BURT menganggarkan pembangunan gedung baru. Kata dia, Gedung Nusantara I, yang menjadi kantor utama DPR saat ini, sudah berusia 20 tahun. Secara fisik, dia menganggap gedung itu sudah tidak ideal. Gedung Nusantara I sudah mengalami overkapasitas sehingga tidak layak lagi menjadi kantor bagi 560 anggota DPR. Terlebih, jumlah anggota DPR periode berikutnya dipastikan bertambah 15 kursi menyusul diberlakukannya Undang-Undang Pemilu baru.

"Gedung ini bukan miring. Menurut assessment tim PUPR, ada pergeseran dan ada keretakan dan harus diinjeksi serta dikurangi bobot. Jadi gedung baru itu adalah kebutuhan yang realitas, bukan mengada-ngada," tegas dia.

Mendengar alasan dan permintaan ini BURT seperti ini, Direktur Eksekutif Pemantau Kebijakan Eksekutif-Legislatif (Majelis) Sugiyanto terkekeh geli. "Hahahaha. DPR ini lucu banget. Masak masyarakat harus memaklumi mereka. Memangnya tidak terbalik," ucapnya sambil tertawa, saat mengobrol dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Sugiyanto pun yakin, permintaan DPR ingin dimaklumi juga bisa jadi tertawaan rakyat. Sebab, dengan notabene berkinerja buruk selama ini, sangat tidak pantas DPR dimaklumi masyarakat.

Sugiyanto kemudian mengingatkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah antipati terhadap DPR. Bukti itu bisa dilihat dari survei Global Corruption Barometer yang dirilis oleh Transparancy Internasional Indonesia (TII) pada Maret lalu, yang menunjukkan DPR sebagai lembaga terkorup. Kata dia, hasil survei ini membuktikan bahwa citra DPR sudah di titik nadir.

Dengan kondisi ini, tambahnya, memaksakan atau mencari-cari alasan agar pembangunan gedung baru terealisasi hanya akan membuat citra DPR makin runyam. "Mungkin, di pikirnya BURT ini masyarakat lupa sehingga diwacanakan lagi. Ingat, publik menolak pembangunan DPR ini karena khawatir hanya jadi sarana korupsi baru. Persoalan serius yang dihadapi DPR saat ini karena tidak ada *trust*," tuturnya. ■ KAL



ANGKAT BIBIT: Ketua Komisi IV DPR Edy Prabowo dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengangkat bungkusan bibit saat pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Pembenihan dan Pembibitan Indonesia di Jakarta, kemarin. Menteri Pertanian Amran Sulaiman (bertopi) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya hadir di acara tersebut.